



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 151-2/BUA/KU.01//07/2017
Lamp : -
Hal : Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2017

31 Juli 2017

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 3. Para Sekretaris Badan
 4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi
 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
 6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di tempat

Berdasarkan pantauan Sistim Monitoring dan Evaluasi Penganggaran (Aplikasi SMART) dan Online Monitoring Sistim Perbendaraan dan Anggaran Negara (OMSPAN) bahwa sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 Mahkamah Agung ada pada peringkat 1 (satu) dari 87 Kementerian/Lembaga dengan prosentase 55,79 %, tetapi prosentase penyerapan anggaran untuk belanja modal baru mencapai 30.81 %.

Guna percepatan realisasi anggaran dan antisipasi akhir tahun yang tinggal beberapa bulan lagi , sebagai tindak lanjut, diminta Saudara untuk segera :

1. Merealisasikan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja masing-masing dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan pada akhir tahun.
2. Mengidentifikasi pengadaan barang/jasa yang belum terealisasi, agar segera direalisasikan.
3. Apabila anggaran belanja modal yang sudah dialokasikan tidak memungkinkan untuk direalisasikan karena satu dan lain hal agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Perlengkapan supaya segera dilakukan realokasi belanja modal untuk satker yang membutuhkan dan sifatnya sangat prioritas.
4. Segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.
5. Segera menyampaikan data kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani serta mempedomani norma waktu penyelesaian tagihan sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012.
6. Penyelesaian tagihan dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat ketepatan penyelesaian tagihan mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan serta menunjukkan komitmen dan berpengaruh langsung pada penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI,



Dr. Drs. H. Aco Nur, MH
NIP19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI
4. Panitera Mahkamah Agung RI
5. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI